

ANALISIS PENGALAMAN AKTIVITAS BANTUAN PANGAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH OLEH KOORDINATOR LAPANGAN PT POS INDONESIA

Alfan Dwicahyo¹, Mei Retno Adiwati²
22012010154@student.upnjatim.ac.id¹, adiwaty66@gmail.com²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah dengan memberikan 10 kg beras per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan ini melibatkan Perum BULOG dan PT Pos Indonesia, yang bertanggung jawab atas pengadaan, penyimpanan, dan distribusi beras. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mengurangi dampak inflasi, dengan pendekatan berbasis data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Diharapkan, CBP dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah, Pt Pos Indonesia, Perum Bulog.

ABSTRACT

The Government Rice Reserve Food Assistance Program (CBP) was launched by the Indonesian government to support low-income communities by providing 10 kg of rice per month to Beneficiary Families (KPM). The distribution of this assistance involves Perum BULOG and PT Pos Indonesia, which are responsible for the procurement, storage, and distribution of rice. This program aims to enhance national food security and mitigate the impact of inflation, using a data-driven approach to ensure that assistance is targeted effectively. It is expected that the CBP will improve the quality of life and address poverty issues in Indonesia.

Keywords: Government Rice Reserve Food Assistance Program, Pt Pos Indonesia, Perum Bulog.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai langkah strategis untuk mendukung masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Program ini bertujuan untuk menyediakan bantuan berupa beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras per bulan, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dengan program ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan mendapatkan akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara terencana dan terkoordinasi, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan data dari program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dengan pendekatan berbasis data ini, diharapkan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara merata.

Selain itu, program CBP juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengurangi dampak inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Melalui penyaluran bantuan pangan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tetapi juga meningkatkan

kualitas hidup. Dengan demikian, program ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakstabilan harga pangan di Indonesia. (HENDRA, 2024)

Perum BULOG memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah, BULOG bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan cadangan beras yang cukup dan berkualitas untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tugas ini mencakup pengadaan beras dari para petani, penyimpanan, serta distribusi ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan stok beras yang memadai, BULOG berupaya menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, BULOG juga aktif melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras di tingkat konsumen.

Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, BULOG melakukan pemantauan terhadap kualitas beras yang disalurkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi penerima. Dengan adanya peran BULOG dalam program CBP, diharapkan penyaluran bantuan pangan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. BULOG terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan distribusi agar setiap KPM mendapatkan haknya secara adil dan tepat waktu. Melalui upaya ini, diharapkan program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional. (Bulog, 2024)

PT Pos Indonesia memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sebagai mitra strategis BULOG, PT Pos Indonesia bertanggung jawab untuk menyalurkan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Dengan jaringan luas dan pengalaman dalam logistik, PT Pos Indonesia mampu menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan distribusi lainnya.

Hal ini memastikan bahwa bantuan pangan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa terkendala jarak. Kerja sama antara PT Pos Indonesia dan Perum BULOG tidak hanya terbatas pada aspek distribusi fisik saja, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses penyaluran. PT Pos Indonesia mengintegrasikan sistem pemantauan real-time yang memungkinkan pelacakan pengiriman beras dari gudang hingga ke tangan penerima.

Dengan aplikasi seperti Pos Giro Cash (PGC), proses penyaluran menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam distribusi. Melalui kolaborasi ini, diharapkan program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. PT Pos Indonesia juga menerapkan berbagai metode penyaluran, termasuk pengambilan di kantor pos dan pengantaran langsung ke rumah bagi penerima yang memiliki keterbatasan fisik. Dengan demikian, kerja sama antara PT Pos Indonesia dan Perum BULOG menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia. (Media Indonesia, 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada proses wawancara yang dilakukan terhadap koordinator lapangan saat penyaluran beras. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh koordinator dalam melaksanakan distribusi bantuan pangan. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi yang relevan mengenai

proses penyaluran, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk memastikan bantuan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait dengan pengalaman koordinator lapangan dalam menjalankan tugas mereka. Pertanyaan tersebut mencakup aspek-aspek seperti mekanisme distribusi, komunikasi dengan pihak terkait, serta umpan balik dari penerima manfaat. Wawancara dilakukan di lokasi distribusi beras, sehingga peneliti dapat mengamati langsung situasi di lapangan dan mendapatkan data yang lebih akurat. Setiap sesi wawancara direkam dan dicatat untuk analisis lebih lanjut.

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari jawaban koordinator lapangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penyaluran bantuan pangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah dan kontribusi koordinator lapangan dalam proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan dua koordinator lapangan, yaitu Fajar Mukti dari Kecamatan Rungkut dan Wonokromo serta Jakfar dari Kecamatan Gayungan dan Wonocolo, penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek terkait penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap 3. Wawancara mendalam dengan kedua narasumber memberikan wawasan yang komprehensif mengenai proses persiapan, mekanisme koordinasi, metode distribusi, tantangan yang dihadapi, serta umpan balik dari penerima bantuan. Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami setiap aspek tersebut guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Paragraf ini memberikan konteks yang jelas tentang sumber informasi yang digunakan dalam penelitian dan tujuan dari pembahasan yang akan dilakukan.

Persiapan Penyaluran CBP Tahap 3

Pertanyaan : “Bagaimana Persiapan Penyaluran CBP Tahap 3?”

Fajar Mukti : “dalam penyaluran cbp tahap 3 ini, persiapan yang saya lakukan pertama tama yakni melakukan dropping beras ke lokasi penyaluran, lalu selanjutnya mencetak seluruh undangan untuk diserahkan kepada kesra di kelurahan yang nantinya undangan tersebut akan dibagikan kepada penerima bantuan lewat rt/rw setempat”

Jakfar : "persiapan saya tentunya mem briefing petugas yang akan bertugas pada saat penyaluran. sebelum itu, saya menyelesaikan proses dropping beras dan menyebarkan undangan lewat aparat setempat"

Persiapan penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap 3 dilakukan secara sistematis dan terencana oleh para koordinator lapangan. Fajar Mukti, yang bertanggung jawab di Kecamatan Rungkut dan Wonokromo, menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah melakukan dropping beras ke lokasi penyaluran. Proses ini melibatkan pengangkutan beras dari gudang penyimpanan ke titik distribusi yang telah ditentukan. Selanjutnya, ia mencetak undangan yang diserahkan kepada pihak kelurahan untuk dibagikan kepada penerima bantuan melalui RT/RW setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai penyaluran sampai kepada masyarakat dengan tepat. Di sisi lain, Jakfar, koordinator lapangan di Kecamatan Gayungan dan Wonocolo, menekankan pentingnya membrieffing petugas yang akan bertugas selama proses penyaluran. Briefing ini mencakup penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-

masing petugas, serta prosedur yang harus diikuti selama penyaluran berlangsung. Jakfar juga memastikan bahwa proses dropping beras telah selesai sebelum undangan disebarkan kepada penerima bantuan. Persiapan yang matang ini menjadi faktor kunci dalam kelancaran distribusi bantuan, karena mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kebingungan di lapangan.

Mekanisme Koordinasi antara PT Pos Indonesia KCU Surabaya dan Pihak Terkait

Pertanyaan : "Bagaimana Mekanisme Koordinasi antara PT Pos Indonesia dan Pihak Terkait?"

Fajar Mukti "langkah koordinasi yang saya lakukan adalah pertama dengan kesra kelurahan untuk proses dropping. dalam hal ini saya terjun langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa beras yang telah tiba di lokasi sesuai jumlahnya dan kondisinya. setelah itu, koordinasi dengan kesra tentang proses berjalannya penyaluran yang nantinya informasi tersebut akan di koordinasikan kepada rt/rw untuk diinformasikan kepada penerima bantuan"

Jakfar : "saya berkoordinasi dengan verifikator, juru bayar, dan koordinator beras untuk memastikan kehadiran mereka tepat waktu, lalu juga menginformasikan kepada kelurahan setempat bahwa akan diadakan penyaluran pada tanggal tertentu dan berlangsung berapa lama"

Koordinasi antar pihak terkait merupakan elemen penting dalam keberhasilan penyaluran bantuan. Fajar Mukti menyatakan bahwa ia melakukan koordinasi langsung dengan pihak kelurahan untuk memastikan bahwa jumlah beras yang tiba di lokasi sesuai dan dalam kondisi baik. Proses ini meliputi pemeriksaan fisik atas jumlah dan kualitas beras sebelum disalurkan kepada penerima manfaat. Setelah itu, informasi mengenai proses penyaluran disampaikan kepada RT/RW untuk diinformasikan kepada penerima bantuan. Komunikasi yang efektif antara semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah berjalan sesuai rencana. Jakfar juga menekankan pentingnya koordinasi dengan verifikator, juru bayar, dan koordinator beras untuk memastikan kehadiran mereka tepat waktu. Dalam hal ini, Jakfar mengatur jadwal pertemuan dengan semua pihak terkait sebelum hari penyaluran untuk memastikan semua orang memahami peran mereka masing-masing. Ia juga menginformasikan kelurahan tentang tanggal dan durasi penyaluran agar mereka dapat mempersiapkan masyarakat dengan baik. Koordinasi yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi proses penyaluran, tetapi juga membangun kepercayaan antara PT Pos Indonesia dan masyarakat.

Metode Distribusi yang Diterapkan

Pertanyaan : "Metode apa yang diterapkan oleh pihak PT Pos Indonesia dalam Distribusi CBP?"

Fajar Mukti : "metode yang diterapkan adalah distribusi langsung kepada penerima bantuan atau lewat perwakilan aparaturnya setempat"

Jakfar : "distribusinya langsung ke penerima bantuan"

Kedua narasumber sepakat bahwa metode distribusi yang diterapkan adalah distribusi langsung kepada penerima bantuan atau melalui perwakilan aparaturnya setempat. Fajar menekankan bahwa keterlibatan aparat setempat dalam proses distribusi sangat penting untuk memastikan semua penerima mendapatkan bantuan secara adil dan tepat waktu. Metode distribusi langsung memungkinkan penerima manfaat untuk menerima bantuan secara langsung dari petugas, sehingga mereka dapat mengonfirmasi identitas mereka dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bantuan yang diterima. Jakfar menambahkan bahwa distribusi melalui perwakilan aparaturnya setempat juga dapat membantu mempercepat proses penyaluran, terutama di daerah dengan aksesibilitas yang terbatas. Dengan melibatkan aparat setempat, informasi mengenai waktu dan tempat distribusi dapat

disebarkan lebih luas, sehingga lebih banyak penerima bantuan dapat terinformasi dengan baik tentang program ini.

Tantangan dalam Penyaluran CBP Tahap 3

Pertanyaan : “Tantangan apa yang anda hadapi dalam penyaluran CBP tahap 3 ini?”

Fajar Mukti : ”Tantangan nya adalah kurang akuratnya aparat setempat dalam memberikan informasi kepada rt/rw atau kurangnya rt/rw untuk mencerna informasi yang kesra telah informasikan sehingga pada saat penyaluran di lapangan banyak pbp yang tidak mengetahui apa saja identitas yang harus di bawa, jam penyaluran, surat lampiran yang harus dibawa, dan lain lain"

Jakfar : “tantangannya adalah kondisi di lapangan pada saat penyaluran yang kurang kondusif, terkadang pbp sulit untuk diarahkan supaya tertib dan rapih supaya tidak terjadi keributan"

Tantangan yang dihadapi selama penyaluran cukup signifikan dan memerlukan perhatian khusus dari para koordinator lapangan. Fajar Mukti mengungkapkan bahwa kurang akuratnya informasi yang disampaikan oleh aparat setempat kepada RT/RW menyebabkan banyak penerima bantuan tidak mengetahui identitas yang harus dibawa, waktu penyaluran, dan dokumen lain yang diperlukan. Hal ini seringkali mengakibatkan kebingungan di lapangan pada saat hari H penyaluran. Jakfar menambahkan bahwa kondisi lapangan sering kali kurang kondusif, terutama saat cuaca buruk atau saat terjadi kerumunan besar dari penerima manfaat. Situasi seperti ini membuat penerima bantuan sulit diarahkan dengan tertib, sehingga dapat menyebabkan keributan dan ketidaknyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi mitigasi risiko untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar proses distribusi dapat berjalan lebih lancar.

Umpan Balik atau Keluhan dari Penerima Bantuan Pangan (PBP)

Pertanyaan : “Bagaimana Umpan Balik atau Keluhan dari PBP?”

Fajar Mukti : "respon penerima bantuan sih senang sekali mendapatkan bantuan, dan juga respon untuk evaluasi adalah antrian yang begitu panjang dikarenakan proses foto yang menggunakan aplikasi PGC (pos giro cash) tiba tiba lemot"

Jakfar : "respon pbp sangat senang mendapatkan bantuan beras dan berharap bantuan seperti ini untuk terus ada. Keluhannya pbp kebanyakan tidak mendapatkan informasi yang jelas sehingga beberapa kali harus pulang lagi untuk membawa persyaratan yang lengkap”

Umpan balik dari penerima bantuan menunjukkan respons positif terhadap program ini meskipun terdapat beberapa keluhan terkait pelaksanaannya. Fajar mencatat bahwa banyak penerima merasa senang menerima bantuan beras, namun ada keluhan terkait antrian panjang akibat lambatnya proses foto menggunakan aplikasi PGC (Pos Giro Cash). Proses verifikasi menggunakan aplikasi tersebut terkadang mengalami kendala teknis, sehingga memperlambat alur distribusi. Jakfar juga mengkonfirmasi bahwa penerima bantuan sangat senang mendapatkan beras; namun banyak dari mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menerima bantuan. Beberapa penerima bahkan harus kembali ke rumah untuk melengkapi dokumen yang diperlukan karena kurangnya sosialisasi sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum hari penyaluran.

KESIMPULAN

Implementasi Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menunjukkan bahwa program ini merupakan inisiatif penting pemerintah untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk memberikan 10

kilogram beras per bulan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar gizi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendistribusian bantuan dilakukan sesuai rencana dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Perum BULOG dan PT Pos Indonesia, untuk membantu memastikan distribusi tepat sasaran dan efisien.

Mekanisme koordinasi antara koordinator lapangan, pejabat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya telah terbukti menjadi elemen kunci keberhasilan penyaluran bantuan. Persiapan yang matang, seperti pendistribusian beras dan penyampaian informasi melalui undangan, akan memastikan penerima mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai waktu dan lokasi pendistribusian. Namun tantangan seperti kurangnya informasi akurat dari pemerintah daerah dan kondisi lapangan yang kurang mendukung seringkali menghambat kelancaran proses distribusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pendistribusian dapat berjalan lebih lancar. Meskipun tanggapan dari penerima bantuan menunjukkan reaksi positif terhadap program CBP, terdapat juga beberapa keluhan mengenai pelaksanaannya, termasuk antrean panjang dan kurangnya informasi yang jelas. Masyarakat pada umumnya berterima kasih atas dukungan yang diterima, namun ingin proses distribusi ditingkatkan dan dibuat lebih efisien. Oleh karena itu, meskipun program CBP tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional namun juga memberikan dampak positif pada masyarakat paling rentan, dan masih ada ruang untuk perbaikan dalam implementasinya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulog. (2024, August 1). BULOG Mulai Salurkan Bantuan Pangan Tahap 3, Sasar 22 Juta KPM. <https://www.bulog.co.id/2024/08/01/bulog-mulai-salurkan-bantuan-pangan-tahap-3-sasar-22-juta-kpm/>.
- HENDRA. (2024, October 3). Bantuan Pangan Kembali Disalurkan, Per KPM dapat 10 Kg beras. <https://madiuntoday.id/berita/2024/10/07/bantuan-pangan-kembali-disalurkan-per-kpm-dapat-10-kg-beras>.
- Media Indonesia. (2024, November 1). Kian Akurat, Pos Indonesia Distribusikan Bantuan Pangan lewat Aplikasi Canggih. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/643607/kian-akurat-pos-indonesia-distribusikan-bantuan-pangan-lewat-aplikasi-canggih>.